



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
P-ISSN : 2621-0312
E-ISSN : 2657-1560
Vol. 6, No. 1 Tahun 2023
DOI : [10.21043/politea.v6i1.19901](https://doi.org/10.21043/politea.v6i1.19901)

Peranan *Gulf Cooperation Council* terhadap Penyelesaian Konflik Qatar-Arab Saudi

Naswan Nasrun
Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia
Email : naswannasrun02@gmail.com

Darwis
Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia
Email : dbundhy@yahoo.com

Nurjannah Abdullah
Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia
Email : nurjannah.abdullah89@gmail.com

Atika Puspita Marzaman
Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia
Email : tika.marzaman@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of the Gulf Cooperation Council (GCC) as a sub-regional organization in the Middle East region towards the settlement of the Qatar-Saudi Arabia conflict and the Qatar-Saudi Arabia conflict resolution strategy within the GCC Framework. The method used in this research is descriptive method with data collection techniques in the form of literature review sourced from books, journals, articles, official internet sites, and reports related to this research.

The results of this study indicate that the GCC acts as an instrument for the Gulf countries to achieve their national goals. One of them is in the process of conflict resolution. The GCC acts as an arena where conflict resolution efforts between GCC member countries are mediated through the implementation of the 38th Summit to the 41st Summit. The Qatar-Saudi Arabia conflict resolution strategy within the GCC Framework was initiated by the GCC member countries, namely Kuwait and Oman. The two countries continue to maintain good relations with Qatar and resolve GCC internal disputes by establishing mediation between Qatar and Arab countries.

Keywords: conflict, Gulf Cooperation Council, Qatar, Saudi Arabia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *Gulf Cooperation Council* (GCC) sebagai organisasi sub-regional di kawasan Timur Tengah terhadap penyelesaian konflik Qatar – Arab Saudi dan strategi resolusi konflik Qatar – Arab Saudi dalam Kerangka GCC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, situs internet resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCC berperan sebagai instrumen bagi negara teluk untuk mencapai tujuan nasional mereka. Salah satunya adalah dalam proses penyelesaian konflik. GCC berperan sebagai arena dimana upaya resolusi konflik antar negara anggota GCC dimediasi melalui pelaksanaan KTT 38 hingga KTT 41. Adapun strategi resolusi konflik Qatar – Arab Saudi dalam Kerangka GCC diinisiasi oleh negara anggota GCC yaitu Kuwait dan Oman. Kedua negara tetap menjaga hubungan baik dengan Qatar serta menyelesaikan perselisihan internal GCC dengan membangun mediasi antara Qatar dan negara-negara Arab.

kata kunci: konflik, Gulf Cooperation Council, Qatar, Arab Saudi

Pendahuluan

Konflik berkepanjangan Qatar – Arab Saudi menciptakan fluktuasi pada stabilitas keamanan di Timur Tengah. Arab Saudi di suatu sisi ingin memperatahkan *status quo* sebagai “pemimpin” Timur Tengah. Sementara Qatar di lain sisi ingin menjadi negara independen yang mampu menjadi penyeimbang kekuatan antara Arab Saudi dan Iran (Fadillah 2017). Kondisi ini menciptakan relasi negatif antara kedua negara yang kemudian berdampak pada stabilitas kawasan.

Ketegangan antara Qatar – Arab Saudi bermula saat arah politik luar negeri Qatar yang dicanangkan oleh Hamad bin Khalifa bertentangan dengan arah kebijakan Arab Saudi. Khalifah menyerukan Qatar untuk memiliki kebijakan secara independen diranah kebijakan luar negeri tanpa kehadiran pengaruh yang dilakukan oleh Arab Saudi. Hamad bin Khalifa secara terang-terangan menyatakan bahwa cara utama untuk menjamin perwujudan keamanan bagi Qatar ialah bersaing dengan Arab Saudi, bukan bersekutu (M. Fisher 2017). Hubungan keduanya diperparah dengan adanya tuduhan yang dilakukan oleh pemerintah Qatar terhadap Arab Saudi bahwa Arab Saudi merupakan dalang dalam aksi kudeta terhadap pemerintahan Hamad bin Khalifa dan mengangkat Syekh Khalifa sebagai penggantinya.

Peristiwa lainnya terus mencuat yang menambah tensi konflik Qatar – Arab Saudi. Al Jazeera, stasiun berita Qatar mengeluarkan pemberitaan negative terkait keluarga kerajaan Arab Saudi yang kemudian berdampak pada penarikan diri duta besar Saudi dari Qatar pada tahun 2002 (Wardoyo 2018). Arab Saudi kemudian memboikot pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diselenggarakan di Doha karena menuding bahwa terdapat kontak bisnis diantara Qatar dan juga Israel (Wardoyo 2018). Hubungan kedua negara juga diperparah pasca *Arab Spring* pada tahun 2010. Arab Saudi maupun Qatar menunjukkan respon berbeda terkait Arab Spring. Dalam kasus yang terjadi pada Mesir misalnya, Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin sedangkan Arab Saudi berada di belakang kelompok militer yang menggantikan Hosni Mubarak. Dukungan yang Qatar berikan terhadap Ikhwanul Muslimin membuat Arab Saudi dan beberapa negara Teluk resah mengingat negara-negara tersebut menggolongkan Ikhwanul Muslimin, serta kelompok lain yang didukung Qatar, sebagai kelompok terorisme. Di awal tahun 2014, hubungan diplomatik antara UEA, Bahrain, Arab Saudi dan juga Qatar mengalami pembekuan yang disebabkan karena adanya perseteruan antar keempat Negara tersebut sebagai akibat dari dukungan politik yang berbeda terkait dengan *Arab Spring*. Kemudian, atas bantuan mediasi yang dilakukan oleh Kuwait, ketiga Negara tersebut akhirnya kembali melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Qatar pada November 2014 (Al-Jazeera 2017).

Selain fenomena *Arab Spring* tersebut, faktor lain yang mempengaruhi keretakan hubungan Qatar – Arab Saudi adalah adanya kedekatan hubungan antara Qatar dengan Iran. Iran merupakan rival utama dari Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Mendekatnya Qatar pada Iran menjadi ancaman terhadap dominasi Arab Saudi di kawasan tersebut.

Tepatnya pada 5 Juni 2017, pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar kembali dilakukan oleh Arab Saudi, UEA dan Bahrain dikarenakan dukungan yang Qatar berikan terhadap kelompok yang dianggap terorisme, media Al-Jazeera yang dianggap sebagai media provokator, dan dukungan Qatar terhadap Iran. Pemutusan hubungan tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah Negara yang meliputi Yaman, Libya, dan Maladewa. Yordania bahkan turut membatasi hubungannya dengan Qatar dan mencabut izin dari media Al-jazeera untuk beroperasi di Yordania. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir bahkan

memasukkan beberapa warga Qatar serta organisasi yang memiliki basis di Qatar sebagai kelompok terorisme (Wardoyo 2018).

Putusnya hubungan diplomatik ini memiliki dampak panjang. UEA melakukan pengusiran terhadap warga Qatar di negaranya. Untuk mengantisipasi pengusiran tersebut Qatar akhirnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Tinggi PBB pada tanggal 23 Juli 2018. Qatar mengungkapkan bahwa aksi UEA tersebut adalah bagian dari aksi boikotnya terhadap Qatar yang dapat memicu diskriminasi rasial. UEA telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung PBB agar tidak melakukan tindak diskriminasi kepada warga Negara Qatar. Para siswa yang sedang dalam masa pendidikan harus diberikan kesempatan dalam menyelesaikan studinya serta diberikan kesempatan untuk menyimpan catatan belajar agar dapat memungkinkan mereka kembali melanjutkan pendidikan. Selain itu warga Qatar harus diberikan izin untuk melakukan akses terhadap layanan perdilan di UEA (Andriani 2017).

Semakin meluasnya dampak dari konflik Arab Saudi – Qatar kemudian berpengaruh dalam dinamika ekonomi dan politik pada negara-negara yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC). Meskipun tergabung menjadi anggota dari GCC, sayangnya Qatar memiliki hubungan yang kurang baik dengan sejumlah negara GCC. Krisis diplomatik yang terjadi sebanyak dua kali dengan beberapa negara GCC menimbulkan citra negatif pada Qatar baik dalam sektor ekonomi, politik maupun keamanan (Jones 2017). Tepatnya pada peristiwa krisis diplomatik kedua tahun 2017, negara anggota GCC menerapkan blokade ekonomi dan transportasi terhadap Qatar yang diprakarsai Arab Saudi. GCC meyakini bahwa aksi Qatar dalam mendukung kelompok teroris dan berpihak pada Iran akan mengancam stabilitas keamanan kawasan (Pradhan 2018).

Untuk mengakhiri adanya permasalahan krisis diplomatik yang terjadi tersebut, negara-negara GCC memberikan tiga belas tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut meliputi pengurangan tingkat hubungan antara Qatar dengan Iran, menghentikan pembangunan pangkalan militer turki yang saat ini sedang dilakukan di Qatar, tidak memberikan dukungan kepada kelompok yang dianggap teroris, serta menutup kantor media Al-Jazeera (Al-Jazeera 2017) (Gulf News 2017).

Qatar mengambil tindakan balasan sebagai tanggapan atas tuntutan tersebut bahwa kedaulatannya tidak akan dirusak. Pada rentang waktu satu bulan setelah penolakan atas 13 tuntutan yang diberikan, Pemerintah Qatar menetapkan keputusan yang bertentangan dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Iran pada Agustus 2017. Keputusan ini menuai kecaman dan juga kemarahan dari negara-negara anggota GCC, sehingga mereka kemudian memperdalam tuduhan negatif terhadap Qatar, terutama terkait dukungannya terhadap terorisme (Kamvara 2017). Dengan adanya krisis dan konflik yang terjadi antara negara-negara GCC tersebut, tentu saja akan mempengaruhi kinerja dan perkembangan dari organisasi GCC itu sendiri sebagaimana apa yang diharapkan dalam tujuan pembentukannya yaitu penciptaan stabilitas ekonomi politik kawasan.

Beberapa penelitian menjadi rujukan dalam melihat konflik Qatar – Arab Saudi dan peran GCC didalamnya. Salah satu penelitian dilakukan oleh Abdulhadi Ajami. Penelitian dengan judul *“The Gulf Crisis: An Insight in to Kuwait’s Mediation Efforts”* tersebut berfokus pada peran Kuwait sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara Qatar dan negara anggota CGG (Ajami, 2018). Penelitian selanjutnya oleh Alexey Khlebnikov, *“The new ideological threats to the GCC: implications for the Qatari-Saudi rivalry”*, dengan menekankan pada aspek ideologis yang menjadi penyebab utama konflik. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perbedaan antara Sunni-Syiah menjadi pendorong utama konflik dibandingkan dengan aspek kemananan konvensional (Khlebnikov, 2015). Selanjutnya penelitian dengan judul *Saudi-Qatar Relations: A Study of Conflict and Cooperation* oleh Niaz Ahmed yang menjelaskan dinamika konflik dan kerjasama antara Qatar dan Arab Saudi (Ahmed, 2020).

Dinamika naik turunnya ketegangan hubungan antara Qatar – Arab Saudi menjadi titik kritis. Sebagai negara dalam satu kawasan tentunya sangat penting untuk menjaga relasi guna menciptakan kemananan dan kestabilan kawasan baik dalam hal ekonomi, politik dan keamanan. Akan tetapi konflik yang berkepanjangan Qatar – Arab Saudi menjadi anomali. Dimana perbedaan kepentingan dan arah politik yang sangat bersebrangan menjadikan kedua negara terlibat konflik.

Walaupun telah mendapat beberapa kali kecaman dari Arab Saudi dan sejumlah negara anggota GCC, Qatar tetap menjalankan politik luar negerinya yang berseberangan.

Arah kebijakan politik Qatar tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai motivasi dan kepentingan Qatar dalam kerangka kebijakan luar negerinya. Selanjutnya respon Arab Saudi sebagai “penguasa” Timur Tengah terhadap kebijakan agresif Qatar juga menarik untuk mendapat kejelasan lebih lanjut. Pada kenyataannya Arab Saudi melihat Qatar sebagai ancaman dan berupaya untuk menghalangi walaupun harus berujung konflik.

GCC yang menjadi wadah kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara yang berkonflik (Qatar dan Arab Saudi) kemudian dipertanyakan eksistensinya. Yaitu bagaimana GCC akan memainkan peran dalam proses penyelesaian konflik, atukah justru menjadi alat bagi pihak yang lebih berkuasa dalam menjalankan agenda politik mereka dan melakukan penekanan terhadap pihak lainnya. Untuk itu penelitian ini mencoba mengelaborasi konflik berkepanjangan antara Qatar dan Arab Saudi kemudian mengkaji keterlibatan GCC sebagai organisasi antarpemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Gulf Cooperation Council (GCC) yang beranggotakan Oman, Bahrain, UEA, Kuwait, Arab Saudi dan Qatar secara lebih spesifik dimaknai sebagai sebuah organisasi sub-regional yang terbentuk melalui berbagai pertimbangan kesamaan yang meliputi aspek etnisitas dan juga agama, sistem perpolitikan yang dianut, maupun aspek sejarah, namun memiliki perbedaan dalam aspek ekonomi dan ukuran secara geografis. Dalam sejarahnya, GCC dibentuk sebagai langkah awal kekhawatiran negara teluk atas ancaman negara Iran akibat prang Iran-Irak tahun 1980-1988 dimana negara teluk berupaya untuk membendung pengaruh kekuatan Syiah Iran (Makhawi 1990). Tujuan dari pembentukan GCC dalam piagam pembentukannya yaitu untuk menciptakan koordinasi, integrasi, dan juga interkoneksi diantara negara anggota di berbagai bidang agar mampu mencapai persatuan (Secretariat General of the Gulf Cooperation Council n.d.)

Pada Proses integrasi awal, GCC melaksanakan proses perdagangan bebas (FTA) guna memberikan bantuan untuk mengurangi pembatasan sector perdagangan diantara negara anggota. Pada tahun 2008 GCC kemudian meluncurkan pasar bebas yang akan menjadi pendorong mobilitas modal dan ketenagakerjaan utama di wilayah timur tengah. Akhirnya, pada 2010 GCC juga memiliki rencana untuk mendirikan sebuah bank sentral yang

memiliki mata uang sendiri (Al-Malawi 2015). Tidak hanya pada pengembangan ekonomi, hadirnya GCC juga banyak dimanfaatkan untuk membangun Kerjasama politik dan strategis. Perlu diingat secara jelas bahwa Negara anggota GCC dikenal sebagai Negara penghasil gas dan minyak bumi yang sangat besar dan banyak dimanfaatkan secara internasional. Oleh sebab itu, sangat penting untuk terus memperhatikan keamanan dan juga stabilitas di kawasan ini (Bojarczyk 2013).

Proses integrasi dalam GCC mendapat batu sandungan terutama dari konflik berkepanjangan antara Qatar dan Arab Saudi. Semakin buruknya hubungan antara Qatar dan negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama Arab Saudi, menjadikan kestabilan ekonomi dan politik semakin sulit untuk dicapai. Eskalasi Konflik dan krisis politik antara Qatar dengan Arab Saudi juga memicu reaksi masyarakat internasional. Dampaknya, Amerika Serikat, China dan negara-negara Eropa mendesak negara-negara anggota GCC untuk segera menyelesaikan krisis diplomatik Qatar melalui dialog yang baik antar pihak.

Krisis diplomatik yang dialami oleh Qatar tentu membawa dampak yang cukup beragam baik bagi negara anggota GCC, dinamika kawasan bahkan dunia internasional. Dalam eskalasi krisis tersebut kemudian melibatkan empat dari total enam anggota GCC secara bersamaan, yakni Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar, sehingga hanya Oman dan Kuwait sebagai pihak netral. Di sisi lain GCC dianggap sebagai salah satu Dewan Kerjasama yang paling berpengaruh di Timur Tengah bahkan di seluruh dunia karena negara-negara anggota GCC merupakan produsen energi yang berdampak pada cadangan energi dunia. Dalam hal ini mereka memainkan peran geopolitik yang strategis.

Tekanan dari berbagai pihak kemudian mendorong GCC untuk menginisiasi proses penyelesaian konflik. GCC mengupayakan agar resolusi konflik mencapai konsensus, dan solusi integratif atau non-zero-sum agar resolusi konflik sedapat mungkin tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak (Brigg, 2008). Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan oleh negara anggota GCC yaitu Kuwait dan Oman. Kuwait terlibat dalam upaya perbaikan hubungan diplomatik antara Negara Teluk dengan Qatar. Pemimpin Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah melakukan pertemuan dengan Arab Saudi untuk menengahi perselisihan yang terjadi dengan Qatar. Dilaporkan juga oleh media Kuwait

bahwa Sheikh Sabah telah melakukan pembicaraan kepada pemimpin Qatar untuk mendesak agar menghindari terjadinya eskalasi konflik (Andriani 2017).

Sejak tahun 2014, Kuwait telah meningkatkan upaya mediasinya secara signifikan. Upaya mediasi Kuwait ini tidak dapat disangkal telah mencapai langkah penting karena mampu menyelenggarakan *Gulf Summit* ke-38 di Kuwait pada 5 Desember 2017. Walaupun demikian keberhasilan ini dibarengi dengan rendahnya keterwakilan beberapa negara peserta; yaitu Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (Alajmi 2018). Pada Oktober 2019, Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah menyerukan untuk segera mengakhiri perselisihan diplomatik dengan Qatar. Menurut Sheikh Sabah, perselisihan yang terjadi antara negara-negara tersebut telah sangat melemahkan kesatuan GCC yang meliputi Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Kuwait dan Bahrain (Nursalikhah 2019). Pada KTT GCC ke 41 krisis yang terjadi telah mengalami perubahan yang signifikan. Dimana dalam GCC yang diselenggarakan di luar ibu kota Riyadh, Arab Saudi telah setuju untuk membuka kembali perbatasan wilayah darat, laut dan udara dengan Qatar (VOA 2021).

Dalam Krisis yang sedang berlangsung menimbulkan dilema besar bagi Kuwait dan Oman. Konsisten dengan kebijakan luar negeri "netral" mereka, kedua negara Teluk Arab tersebut telah mempertahankan hubungan dengan Doha dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan internal GCC yang paling parah sejak pembentukan organisasi tersebut pada tahun 1981. Pejabat di Kuwait City dan Muscat khawatir bahwa kegagalan untuk menyelesaikan krisis akan memecah dewan, yang secara langsung akan merusak kepentingan nasional penting Kuwait dan Oman mengingat potensi skenario seperti itu untuk secara dramatis memperburuk ketidakstabilan geopolitik regional.

Sejalan dengan Kuwait, dalam upaya untuk mengatasi keretakan dalam tubuh GCC, pada tanggal 5 Juni Menteri Luar Negeri Oman, Yousuf bin Alawi bin Abdullah pergi ke Doha dalam perjalanan pribadi. Menurut Surat Kabar yang berbasis di UAE, *The National*, pada hari berikutnya para pejabat di Doha meminta bantuan rekan-rekan mereka di Muscat untuk menengahi perselisihan tersebut. Dalam pertemuan itu baik Oman maupun Qatar setuju untuk melakukan kesepakatan penyelesaian konflik.

Adapun dalam kasus Oman, Arab Saudi telah mengisyaratkan ketidaksenangannya tentang meningkatnya hubungan Oman-Iran sehingga Oman tidak dapat dilihat sebagai pihak

“netral” dalam krisis yang sedang berlangsung di GCC. Untuk alasan ini, Kuwait, yang tetap lebih dekat dengan Riyadh daripada Muscat, memiliki peluang lebih cerah untuk berhasil menjembatani kesenjangan antara tuntutan dan kondisi pihak yang berbeda untuk pemulihan hubungan melalui pembicaraan meja bundar (Karasik 2017). Meskipun demikian, Oman tetap menjaga hubungan baiknya dengan Qatar tanpa terlibat dalam mendukung pihak manapun dalam krisis yang terjadi dan terus mendukung mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan krisis diplomatik di Qatar. Dalam krisis Teluk tersebut, upaya mediasi Kuwait merupakan upaya untuk menjembatani keretakan Teluk yang terjadi antara lebih dari setengah negara-negara GCC—Qatar, di satu sisi, Arab Saudi, Uni Arab Emirates, dan Bahrain di sisi lain, terutama yang berkaitan dengan eskalasi ketegangan hingga konflik bersenjata yang mungkin mengarah pada perubahan rezim di Doha (Alajmi 2018).

Krisis yang berlangsung menimbulkan dilema besar bagi Kuwait dan Oman. Konsisten dengan kebijakan luar negeri "netral" mereka. Kedua negara pun berusaha mempertahankan hubungan dengan Doha dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan internal dalam GCC yang paling parah sejak pembentukan organisasi tersebut pada tahun 1981. Mereka khawatir bahwa kegagalan untuk menyelesaikan krisis Qatar akan memecah dewan, yang secara langsung akan merusak kepentingan nasional penting Kuwait dan Oman dan memperburuk ketidakstabilan geopolitik regional.

Dari fenomena tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Kuwait dan Oman sebagai representasi GCC, memiliki peran besar dalam upaya penyelesaian konflik dari konflik Qatar-Arab Saudi. Secara konseptual, organisasi internasional mempunyai tiga peran utama yaitu sebagai instrumen, arena dan sebagai aktor independent. Sebagai instrumen, organisasi internasional dipergunakan oleh negara anggotanya guna mencapai tujuan tertentu yang berdasarkan tujuan politik luar negerinya; Sebagai sebuah arena, organisasi internasional merupakan tempat berkumpulnya para anggotanya untuk berdiskusi dan membahas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tidak jarang, organisasi internasional digunakan oleh berbagai negara untuk mengangkat masalah internal mereka dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional; Sebagai aktor independen, organisasi internasional

dapat mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Yani 2006).

Dalam konteks upaya resolusi konflik dalam konflik Arab Saudi-Qatar, GCC diidentifikasi sebagai instrument, yaitu organisasi internasional dapat dimanfaatkan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya dan tempat bertemunya anggota-anggotanya untuk membicarakan dan juga membahas masalah-masalah yang dihadapi. Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kehadiran GCC tentunya menjadi sebuah jembatan bagi upaya penyelesaian konflik antara Arab Saudi – Qatar. Sebagai sebuah organisasi kawasan, kehadiran GCC tentunya berperan penting sebagai instrumen bagi negara yang berkonflik untuk menghasilkan sebuah kepentingan bersama yang mampu menjadi sebuah resolusi konflik.

Selanjutnya sebagai sebuah arena, GCC menyelenggarakan KTT. Upaya resolusi konflik pun dibahas dalam KTT tersebut. GCC hadir dengan memberikan ruang bagi negara anggotanya untuk lebih terbuka akan diskusi Dalam menyelesaikan konflik Arab Saudi – Qatar. Kehadiran GCC melalui pertemuan tersebut tentunya menjadi sebuah peluang yang lebih besar untuk hubungan negara timur tengah yang lebih dinamis. Dalam KTT ke-40 Raja Arab Saudi Salman mengundang Emir Qatar Syeikh Tamim untuk menghadiri KTT dan pada KTT 41 Arab Saudi telah membuka kembali perbatasan darat, laut dan udaranya dengan Qatar. Hal ini menjadi sebuah kemajuan besar dalam penyelesaian konflik berkepanjangan antara Qatar – Arab Saudi sebagai dua negara yang tergabung dalam GCC.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa organisasi GCC terbentuk dikarenakan adanya kesadaran kolektif negara-negara teluk untuk dapat berintegrasi sebab terdapat sejumlah dinamika kawasan yang melatarbelakangi terbentuknya GCC antara lain Revolusi Iran, Perang Iran-Irak, serta melemahnya Liga Arab. Oleh sebab itu, sejumlah negara Teluk telah membentuk GCC untuk membantu menciptakan rasa solidaritas yang kuat dan keamanan di wilayah mereka dan dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya kekhawatiran tentang ancaman keamanan semata, tetapi juga telah berkembang menjadi fase menjalin kerja sama multilateral di bidang perekonomian, budaya, dan juga sosial untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu kesatuan.

Hal tersebut sejalan dengan pendekatan *Geographical Proximity* dan *Neofunctionalist Approach* (Abass, 2004). *Geographical Proximity* merupakan prinsip sederhana yang mengungkapkan bahwa wilayah yang secara geografis berdekatan dapat mengarah pada kohesi regional. Keanggotaan dalam organisasi regional yang menganut asas ini dalam prakteknya sangat tertutup bagi negara lain di luar wilayahnya. Kemudian *Neofunctionalist Approach* menganggap bahwa saat ini terdapat berbagai jenis masalah yang berkembang antar negara di dunia yang tidak lagi dapat diselesaikan oleh hanya satu negara, hal tersebut membuat teori ini kemudian mengusulkan perlunya suatu organisasi yang menyatukan negara-negara untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama.

Berangkat dari pandangan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa negara anggota GCC terbentuk akibat memiliki kemiripan di beberapa aspek seperti agama, etnis, sistem politik, dan sejarah; walaupun terdapat beberapa perbedaan seperti aspek ekonomi dan ukuran secara geografis. Dengan adanya persamaan tersebut akhirnya mereka berupaya untuk menjaga kohesivitas diantara kawasan tersebut. Terlebih banyaknya permasalahan yang terjadi di kawasan teluk turut memicu kedekatan antar anggota GCC mulai dari program nuklir Iran, ancaman terorisme, hingga krisis politik di Bahrain. Akibatnya, negara-negara Teluk menyadari bahwa kebutuhan yang lebih besar akan kemandirian dan kerjasama perlu dihadirkan, terutama dalam melawan ancaman eksternal dan dinamika yang berubah di Timur Tengah.

Merujuk pada prinsip *Neofunctionalist Approach*, dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan Kuwait dan Oman untuk turut andil dalam memediasi hubungan Qatar dengan negara Teluk lainnya didasari oleh kesamaan tujuan yang dimiliki oleh negara anggota GCC. GCC bertujuan menciptakan kestabilan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan bagi negara teluk secara progresif yaitu dengan menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan interkoneksi antar negara anggota di segala bidang untuk mencapai kesatuan di antara mereka. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka peselisihan antara negara anggota harus diatasi, terutama konflik yang mengganggu stabilitas organisasi. Dalam hal ini Kuwait dan Oman sebagai negara netral berupaya untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran penting Kuwait dan Oman dalam kerangka GCC menciptakan Langkah penting dalam penyelesaian konflik Qatar – Arab Saudi.

Adapun dua strategi utama yang dapat disimpulkan dari pemaparan diatas. Pertama bahwa sebagai organisasi sub-regional kawasan, GCC mengupayakan resolusi konflik antara Qatar-Arab Saudi berupa jalur perundingan mediasi damai dengan melibatkan negara anggota GCC lain yang bersifat netral. Kedua adalah dengan memanfaatkan organisasi sub-regional sebagai wadah untuk menampung berbagai informasi kedua belah pihak. Pertukaran dalam organisasi ini menjadi pertimbangan pemulihan hubungan Qatar-Arab Saudi.

Strategi mediasi yang dilakukan melalui perantara anggota GCC tentunya menjadi sebuah peluang perbaikan hubungan antara Qatar-Arab Saudi terlebih lagi bahwa sebagai organisasi sub-regional maka GCC harus mampu untuk untuk memonitoring kondisi anggotanya dan mampu untuk menghasilkan perjanjian damai antar anggota yang berkonflik. Dalam perkembangannya, mediasi tentunya akan mengalami berbagai kendala apabila kedua belah pihak yang berkonflik tidak dapat menyetujui kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, GCC menjadi kunci utama yang dapat mengikat hubungan baik antar Qatar - Arab Saudi sehingga masalah antar keduanya dapat terselesaikan. Keberhasilan strategi ini tentunya dibuktikan dengan pemulihan hubungan Qatar-Arab Saudi yang semakin nampak saat ini dengan dibuka kembalinya perbatasan darat, udara maupun laut antara Qatar-Arab Saudi, pembukaan kembali pos keamanan yang berada diperbatasan kedua negara.

Kesimpulan

Gulf Cooperation Council (GCC) merupakan organisasi regional di kawasan Timur Tengah yang berperan sebagai instrumen dan arena dalam proses penyelesaian konflik berkepanjangan antara Qatar dan Arab Saudi. Sebagai instrumen, GCC hadir sebagai sarana untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini keterlibatan Kuwait dan Oman sebagai mediator memegang peran kunci. Adapun GCC sebagai arena, GCC berhasil menyelenggarakan KTT dengan mempertemukan Qatar dan Arab Saudi dan mampu menghasilkan kesepakatan perdamaian.

Dengan menggunakan pendekatan *Geographical Proximity* dan *Neofunctionalist Approach*, dapat diidentifikasi bahwa aspek kedekatan geografis menjadi alasan utama setiap negara menjaga hubungan baik, tidak tekecuali Qatar – Arab Saudi dalam kerangka GCC. Adapun dalam proses penyelesaian konflik, GCC mendorong Kuwait dan Oman sebagai

mediator pihak ketiga untuk menjaga hubungan baik dan membangun komunikasi. Upaya ini menuai keberhasilan dengan dibukanya kesepakatan damai dan Kerjasama diantara dua negara.

Dengan menganalisis konflik Qatar – Arab Saudi dan peran serta GCC dalam penyelesaiannya, penting pula melihat bahwa terdapat aspek yang belum diteliti sehingga menjadi kelemahan dalam penelitian ini. Keterlibatan pihak internasional dalam hal ini Turki, Uni Eropa dan Amerika Serikat juga turut berpengaruh dalam proses penyelesaian konflik antara Qatar dan Arab Saudi. Untuk menjadi saran bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terkait peran maupun intervensi internasional posese penyelesaian konflik Qatar – Arab Saudi.

Referensi

- Abass, Ademola. 2004. *Regional Organisation and the Development of Collective Security Beyond Chapter VIII of the UN Charter*. Oregon: Hart Publishing.
- Ajeng, Retno. 2018. *Saudi-Qatar Akhiri Perselisihan* . November 14. Accessed Maret 7, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/14/11/18/nf7v4j29-saudiqatar-akhiri-perselisihan>.
- Al- Jazeera. 2014. *Gulf States Agree Deal to End QQatar Tensions*. April 17. Accessed Februari 23, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2014/4/17/gulf-states-agree-deal-to-end-qatar-tensions>.
- Alajmi, Abdulhadi. 2018. "The Gulf Crisis: An Insight Into Kuwait's Mediation Efforts." *International Relations and Diplomacy* 537-548.
- Al-Jazeera. 2017. *Arab States Issue 13 Demands to End Qatar-Gulf Crisis*. Juli 12. Accessed 02 22, 2022.
- . 2018. *Qatar-Gulf Crisis: All the Latest Updates*. Agustus 2. Accessed Maret 7, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2018/8/2/qatar-gulf-crisis-all-the-latest-updates>.
- . 2017. *Timeline of Qatar -GCC Disputes from 1991 to 2017*. Juni 9. Accessed Februari 22, 2022. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/timeline-qatar-gcc-disputes-170605110356982.html>.
- Al-Malawi, Nasser. 2015. "Intra-Gulf Cooperation Council: Saudi Arabia Effect." *Journal of Economic Integration*, vol. 30, no. 3 533-552.

- Andriani, Renat Sofie. 2017. *Mediasa Perseteruan Qatar-Negara Arab, Pemimpin Kuwait Terbang ke Arab Saudi*. Juni 6. Accessed Maret 7, 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20170606/19/659899/mediasi-perseteruan-qatar-negara-arab-pemimpin-kuwait-terbang-ke-arab-saudi>.
- Bojarczyk, Bartosz. 2013. "The Gulf Cooperation Council- Regional Integration Mechanism." *Annales Vol. 10 No. 1* 70-85.
- Brigg, Morgan. 2008. *The New Politics of Conflict Resolution: Responding to Difference*. England: Palgrave Macmillan.
- Fadillah, Ramadhian. 2017. *Mengungkap 5 penyebab di balik perpecahan Arab Saudi dkk vs Qatar*. Juni 7. Accessed Agustus 18, 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengungkap-5-penyebab-di-balik-perpecahan-arab-saudi-dkk-vs-qatar.html>.
- Fisher, Max. 2017. *How the Saudi-Qatar Rivalry Now Combusting Reshaped the Middle East*. Juni 13. Accessed Februari 22, 2022. <https://www.nytimes.com/2017/06/13/world/middleeast/how-the-saudi-qatar-rivalry-now-combusting-reshaped-the-middle-east.html>.
- Gulf News. 2017. *What are the 13 demands given to Qatar?* June 23. Accessed November 08, 2021. <https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/what-are-the-13-demands-given-to-qatar-1.2048118>.
- Hassan, Dr. Omar Al. 2015. *The GCC's Formation: The Official Version*. March 30. Accessed November 2, 2021. <https://studies.aljazeera.net/en/dossiers/2015/03/201533011258831763.html>.
- Hassan, Omar Al. 2015. *The GCC's Formation: The Official Version*. Maret 30. Accessed Februari 20, 2022. <https://studies.aljazeera.net/en/dossiers/2015/03/201533011258831763.html>.
- Jones, Michael. 2017. "What's going on with Qatar." *The Qatar Crisis: Project on Middle East Political Science* 6.
- Kamvara, Mehran. 2017. "Iran – Qatar Relations." *Center for International and Regional Studies* 167.
- Karasik, Giorgio Cafiero & Theodore. 2017. *Kuwait, Oman, and the Qatar Crisis*. Juni 22. Accessed Maret 12, 2022. <https://www.mei.edu/publications/kuwait-oman-and-qatar-crisis>.
- Kirkpatrick, Anne Barnard & David D. 2017. *5 Arab Nations Move to Isolate Qatar, Putting the U.S. in a Bind*. Accessed Maret 7, 2022. <https://www.nytimes.com/2017/06/05/world/middleeast/qatar-saudi-arabia-egypt-bahrain-united-arab-emirates.html>.
- Makhawi, Rashid A Al. 1990. *The Gulf Cooperation Council: A Study in Integration*. Accessed Februari 20, 2022. <http://usir.salford.ac.uk/14699/1/D091355.pdf>.

- MEA. 2013. *Gulf Cooperation Council (GCC)*. 02. Accessed 11 02, 2021. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Gulf_Cooperation_Council_MEA_Website.pdf.
- Nursalikah, Ani. 2019. *Raja Salman Undang Emir Qatar ke KTT GCC*. Desember 4. Accessed Maret 12, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/q1zjeq366/raja-salman-undang-emir-qatar-ke-ktt-gcc>.
- Pradhan, Prasanta Kumar. 2018. "Qatar Crisis and the Deepening Regional Faultlines." *Strategic Analysis Vol. 42 No. 4*.
- Radio Free Europe. 2017. *Tillerson Leaves With No Comment After Four-Day Qatar Crisis Talks*. Juli 13. Accessed Maret 10, 2022. <https://www.rferl.org/a/us-saudi-qatar-tillerson-leave-talks-no-comment/28614750.html>.
- Secretariat General of the Gulf Cooperation Council. n.d. *Objectives*. Accessed 02 20, 2022. <http://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/Pages/StartingPointsAndGoals.aspx>.
- . n.d. *Organizational Structure*. Accessed Februari 20, 2022. <https://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/Pages/OrganizationalStructure.aspx>.
- Subito, Bernardo J. 2017. *Menunggu Peran Turki dalam Krisis Qatar*. Juni 8. Accessed Maret 7, 2022. <https://geotimes.id/kolom/internasional/menunggu-peran-turki-dalam-krisis-qatar/>.
- Tamimi, Naser Al. 2020. *Bridging the Gulf: what is there to gain from a GCC Union?* Mei 20. Accessed Mei 18, 2022. <https://english.alarabiya.net/special-reports/bridging-the-gulf/2013/05/05/Bridging-the-Gulf-what-is-there-to-gain-from-a-GCC-Union->.
- U.S. Department of State. 2017. *Press Availability with Secretary of Defense James Mattis, Australian Foreign Minister Julie Bishop, and Australian Defense Minister Marise Payne*. Accessed Maret 7, 2022. <http://bit.ly/2qTPX5S>.
- VOA. 2021. *Setelah 3 Tahun Berselisih, Arab Saudi Pulihkan Hubungan dengan Qatar*. Januari 6. Accessed Maret 13, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/setelah-3-tahun-berselisih-arab-saudi-pulihkan-hubungan-dengan-qatar/5726076.html>.
- Wardoyo, Broto. 2018. "Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk." *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 07 No. 1* 81-94.
- White, Elizabeth. 2019. *The Qatari Diplomatic Crisis: All right, we'll call it a draw*. Maret 8. Accessed Maret 7, 2022. <https://www.aspistrategist.org.au/the-qatari-diplomatic-crisis-all-right-well-call-it-a-draw/>.
- Yani, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zohal, H. 2011. *What Determines Trust in International Organizations ? An Empirical Analysis fot the IMF, the World Bank and the WTO*. Paper, MPRA Paper.